



Vol. 6, No. 2,
November 2024
e-ISSN: 2540-9174
doi:
<https://doi.org/10.17509/jpi.v6i2.72373>

Representasi Isu Disabilitas di Media Daring

Raodatuljanah¹, Ken Devina², Putra Surya
Setiawansyah³, Amanda Syakira Maulida⁴

¹UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

¹ukhtyraodatul@gmail.com, ²kendevina@gmail.com, ³putrasuryas098@gmail.com, ⁴amanda.syakirr@gmail.com

Informasi Artikel:

Dikirim:
14-07-2024
Revisi:
12-10-2024
Diterima:
12-11-2024
Terbit:
12-11-2024

Kata Kunci:

disabilitas; analisis
wacana kritis;
representasi media;
diskriminasi;
sensitivitas bahasa;
inklusi sosial;
pembelajaran
jurnalistik;
keberagaman;
falsafah etik

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kasus representasi isu disabilitas di media daring melalui pendekatan analisis wacana kritis. Kasus media massa menyampaikan informasi bias dan stigma yang merugikan penyandang disabilitas. Media daring memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan persepsi sosial terhadap penyandang disabilitas, namun sejumlah pemberitaan cenderung membingkai (BK, *framing*) kasus kekerasan seksual dan sejumlah isu lain secara tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan diksi dan BK yang bias serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pemberitaan yang lebih inklusif dan sensitif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi, melibatkan pengumpulan artikel berita, wawancara dengan pakar, dan melakukan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pemberitaan media daring membingkai kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebagai insiden kriminal individual, dengan diksi yang bias seperti istilah "korban" yang memperkuat stigma negatif. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih marak dalam pemberitaan, dengan kurangnya fokus pada isu-isu struktural yang mendasari diskriminasi tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran pemberitaan terkait disabilitas dengan penggunaan bahasa yang lebih inklusif dan sensitif, serta perhatian terhadap isu-isu struktural yang mendasari diskriminasi. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran dan empati terhadap penyandang disabilitas, serta menjadi acuan bagi akademisi dan jurnalis dalam memperbaiki kualitas pemberitaan.

Pendahuluan

Penyandang disabilitas mental (PDM) sering kali mengalami stigma yang berat di masyarakat. Sering kali bermula dari kurangnya pemahaman dan ketakutan terhadap kondisi PDM sehingga menimbulkan perlakuan tidak adil bahkan penolakan dari keluarga dan masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai kepada PDM dan dalam mendorong inklusi dan partisipasi mereka dalam masyarakat secara keseluruhan. Media massa memiliki peranan penting untuk mengkoordinasikan terhadap rujukan dan melindungi kelompok minoritas di tengah-tengah dominasi suatu kelompok dalam masyarakat pluralis (Aririguzoh, 2022; Anshori, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana kritis dalam kasus penyajian berita tentang penyandang disabilitas di media daring. Penyandang disabilitas terus mengalami diskriminasi dan pengucilan di banyak bidang kehidupan, termasuk pemberitaan media. Media massa mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi yang berkualitas, namun praktik jurnalisme daring (*online*) sering kali meremehkan objektivitas berita dan mengabaikan prinsip keseimbangan, akurasi, dan kehati-hatian.

Kasus-kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk penolakan pihak berwenang untuk memberikan akses yang setara kepada penyandang disabilitas, menunjukkan bahwa permasalahan ini masih relevan dan memerlukan perhatian. Dalam konteks ini, analisis wacana kritis dapat membantu seseorang memahami cara media daring menggunakan wacana ketika memberitakan penyandang disabilitas. Faktor dalam sikap marjinalisasi masyarakat terhadap Penyandang disabilitas mental (PDM) adalah media massa. Dalam hal ini Media memiliki peran yang cukup besar tindakannya terhadap masyarakat, mengingat media massa dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang terjadi atau sebagai sarana untuk mengetahui sebuah peristiwa (*window on event and experiences*).

Penelitian ini mengkaji cara media daring menggunakan wacana dalam pemberitaan mengenai penyandang disabilitas dan jenis strategi kewacanaan yang digunakan untuk menggambarkan penyandang disabilitas dalam pemberitaan. Oleh

karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan empati terhadap penyandang disabilitas melalui analisis wacana kritis yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis sebagai metode untuk menganalisis berita tentang penyandang disabilitas yang diterbitkan oleh media daring. Analisis ini mempertimbangkan unsur kekuasaan, ideologi, dan strategi wacana yang digunakan dalam berita. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan jurnalis untuk meningkatkan kualitas pemberitaan mengenai penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Berkaitan dengan penjelasan yang sudah disampaikan pada latar belakang, menunjukkan bahwa penelitian ini lebih sesuai menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh refleksi diri (pribadi), pengetahuan, latar belakang, sosial, kreativitas, dan kemampuan peneliti secara pribadi (Flemming & Noyes, 2021). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data secara menyeluruh (Crameri et al., 2020). Penelitian ini tidak mengutamakan jumlah populasi atau sampel, dan bahkan populasinya bisa sangat terbatas. Selama data yang dikumpulkan sudah cukup mendalam dan dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, tidak perlu mencari sampel tambahan. Fokus utama dari penelitian ini adalah kedalaman (kualitas) data, bukan kuantitas (Crameri et al., 2020). Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, peneliti diharapkan mampu menyajikan konseptualisasi yang jelas serta memiliki definisi dan konsep dari fenomena yang akan diteliti, termasuk menunjukkan dimensi-dimensi atau sub dimensi dari konsep atau fenomena yang menjadi fokus penelitian (Crameri et al., 2020).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis wacana kritis (AWK, *critical discourse analysis*, CDA) untuk menganalisis “Pemberitaan Gadis Disabilitas yang Disetubuhi oleh Seorang Kakek pada Media Online INews.id.” Analisis wacana kritis merupakan metode yang mengamati aspek bahasa sebagai komponen penting untuk memahami dinamika yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat. Pada AWK, bahasa dilihat dalam konteks bahasa sebagai alat praktik, termasuk tujuan tertentu dan praktik ideologis, selain teks (Calderón-Larrañaga et al., 2022). Menurut Fairclough yang dikutip oleh Hamad, AWK melihat teks sebagai sesuatu yang memiliki konteks baik dari segi “proses produksi” atau “produksi teks”, “proses respons” atau “konsumsi teks” maupun dari perspektif praktik sosiokultural (Hamad, 2010, p. 66). Selain itu, menurut Fairclough, analisis wacana kritis memandang wacana sebagai bentuk praktik sosial (Jufanny & Girsang, 2020). Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan kriteria yang kontekstual dan holistik. Tidak

hanya aspek kebahasaan dalam struktur teks yang perlu diperhatikan, tetapi juga aspek lain yang penting dalam menemukan makna sebuah wacana, yaitu hasil interpretasi atas produksi dan konsumsi teks serta aspek sosial-politik yang mempengaruhi pembuatan teks (praktik sosial-politiknya). Dengan kata lain, aspek sejarah dari pembentukan wacana tersebut harus dipertimbangkan. Hal ini mencakup dimensi pemikiran dan bahasa pembuat wacana (Jufanny & Girsang, 2020).

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Proses pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh berbagai macam data dan informasi terkait berbagai macam landasan atau kajian teori, buku, literatur, catatan, kajian terdahulu, dokumen, jurnal-jurnal, dan berbagai literatur ilmiah dan referensi lainnya (Milya Sari & Asmendari, p. 43). Dalam penelitian ini, data sekundernya berasal dari kajian-kajian terdahulu dan buku-buku yang berada di perpustakaan utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan melalui perpustakaan daring seperti buku Google (*Google books*) dan sejenisnya. Selain itu, penelitian ini mengumpulkan data sekunder melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari, membaca, mengumpulkan, dan menganalisis, seperti menganalisis jurnal, buku, artikel, dan literatur lainnya. Dokumentasi ini bisa didapat melalui internet atau yang berada di perpustakaan terkait penelitian. Data yang didapat dari dokumentasi dijadikan sebagai data sekunder. Data sekunder tentunya memiliki tujuan untuk melengkapi data primer (Nabila Riyadi, P. P, 2023, p. 13). Data sekunder melalui dokumentasi ini didapatkan oleh peneliti melalui berita di media daring tentang isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Hasil dan Pembahasan

Tindakan membingkai (BK, *framing*) merupakan salah satu cara menyajikan sebuah peristiwa oleh media. Penyajian tersebut dilakukan untuk menekankan bagian-bagian tertentu atau menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari sebuah peristiwa atau realitas. Media menghubungkan, menyeleksi, dan menonjolkan peristiwa hingga makna dari suatu peristiwa lebih mudah diingat dan menyentuh pembaca (Patriarca et al., 2020). Dalam konteks pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, BK yang dilakukan oleh media daring memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman publik. Berikut ini adalah analisis lebih mendalam mengenai cara media daring melakukan BK pada kasus tersebut.

BK pada Pemberitaan

BK dalam sebuah berita bisa dilihat dari sisi isi berita yang ditulis, seperti halnya pada judul atau sub judul yang menjadi komponen utama dan paling pertama menarik perhatian pembaca, serta dapat menentukan persepsi awal pembaca dari suatu berita yang sedang atau akan dibaca. Dalam berita yang berjudul “Kakek di Batanghari Setubuhi Gadis Disabilitas Tetangganya, Kini Hamil 4 Bulan,” yang dipublikasi melalui media daring pada Rabu, 8 November 2023 ini, memilih kata-kata yang secara langsung menggambarkan tindakan kekerasan seksual dan kondisi korban (penyandang disabilitas). Pada judul beritanya, media daring melakukan BK berita melalui judul dengan penekanan pada identitas pelaku sebagai seorang “kakek” dan korban sebagai “gadis disabilitas” serta menekankan dampak nyata dari tindakan tersebut, yaitu “kehamilan.” Di sisi lain, media daring melakukan BK berita tersebut dengan menggunakan kata “setubuhi” yang digunakan pada judul memiliki konotasi sangat negatif dan langsung mengarahkan pembaca pada tindakan kejahatan seksual yang dilakukan. Penekanan pada kondisi korban yang “kini hamil 4 bulan” menambah elemen emosional dan dramatis pada berita, sehingga dapat menarik perhatian dan membangkitkan rasa kemarahan maupun rasa empati pembaca terhadap korban.

Berita yang berjudul “Kakek di Batanghari Setubuhi Gadis Disabilitas Tetangganya, Kini Hamil 4 Bulan,” menggunakan pola piramida terbalik dalam pengkonstruksian berita. Dapat dilihat dari isi berita yang mencakup informasi utama dan menjelaskan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek di Batanghari, yang kemudian menjelaskan tentang tindakan penangkapan pelaku berinisial AS oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batanghari. Latar informasi dari berita ini yang disajikan oleh wartawan pada berita tersebut bersumber dari pihak berwenang yaitu menurut Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batanghari dan orang tua korban.

Pada bagian pengutipan, wartawan mengutip narasumber yaitu Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Piet Yardi sebanyak dua kali. Mulai dari mengungkapkan penangkapan pelaku kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas, menjelaskan kronologis kejadian, dan awal mula terbongkarnya kasus kekerasan tersebut terjadi. Penutup pada berita dilakukan dengan menyatakan bahwa kini pelaku ditahan dengan dijerat Pasal 6 Huruf b Jo Pasal 15 Huruf H UU RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang kekerasan seksual. Cara media daring melakukan BK kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas memiliki dampak langsung pada persepsi publik. Pemberitaan yang sensasional dan berfokus pada aspek kekerasan tanpa memberikan konteks yang memadai dapat memperkuat stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas. Sebaliknya, pemberitaan yang

komprehensif dan berfokus pada hak-hak korban serta upaya pencegahan dan penanggulangan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Penangkapan pelaku kekerasan seksual yang dilakukan dengan tanpa perlawanan dari pelaku menjadi salah satu sisi yang mampu memunculkan persepsi publik terhadap pelaku yang memang sudah seharusnya ditangkap akibat dari perbuatannya. Selain itu, respon dari keluarga yang dijelaskan dalam berita menunjukkan sisi kepedulian dan tanggung jawab orang tua dalam melindungi anaknya, sehingga kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bisa cepat terbongkar.

Tindakan BK yang digunakan dalam berita yang berjudul “Kakek di Batanghari Setubuhi Gadis Disabilitas Tetangganya, Kini Hamil 4 Bulan” menjadi salah satu contoh konkret isu disabilitas yang direpresentasikan di media daring. Judul berita tersebut menunjukkan bahwa media daring cenderung menekankan pada aspek sensasional dari peristiwa tersebut, dengan berfokus pada tindakan kekerasan dan kondisi korban yang hamil. Representasi melalui BK seperti dalam pemberitaan isu disabilitas ini, dapat memberikan gambaran tentang kerentanan penyandang disabilitas yang memang sering kali menjadi kelompok marginalisasi dan diskriminasi terhadap kekerasan seksual serta gambaran mereka yang sering menjadi korban dan rentan.

Tindakan BK yang dilakukan oleh media daring ini menjadi salah satu pertimbangan tentang representasi keadilan yang diterima penyandang disabilitas dari berita tersebut atukah dapat memperkuat stereotip negatif yang banyak menekankan pada aspek sensasional saja. Berita dengan judul “Kakek di Batanghari Setubuhi Gadis Disabilitas Tetangganya, Kini Hamil 4 Bulan” ini menunjukkan bahwa BK yang dilakukan oleh wartawan ditekankan pada kata “kini hamil 4 bulan” yang digunakan di judul berita, yang memunculkan pandangan atau sisi emosional dan dramatis, serta rasa empati dari pembaca terhadap isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang diberitakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BK yang ditekankan pada berita tersebut terletak pada judulnya yang memang menjadi daya tarik pertama bagi pembaca, penggunaan kata-kata “gadis disabilitas, disetubuhi, dan kini hamil 4 bulan” menjadi kata yang dapat merepresentasikan persepsi publik terhadap berita yang dibaca.

Penggunaan Diksi dan Persepsi Pembaca

Diksi atau pilihan kata merupakan elemen penting dalam penulisan berita. Penggunaan diksi dalam pemberitaan sangat penting karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi dan interpretasi pembaca. Diksi yang tepat dapat membantu jurnalis menyampaikan informasi secara akurat, objektif, dan menarik

bagi pembaca. Namun, diksi yang tidak tepat dapat memicu misinterpretasi, bias, dan bahkan manipulasi. Diksi yang emosional, misalnya, dapat membangkitkan perasaan tertentu pada pembaca, seperti kemarahan, ketakutan, atau kesedihan. Diksi yang bias, di sisi lain, dapat memengaruhi cara pembaca menafsirkan suatu peristiwa.

Menurut Entman (1993), pilihan kata yang digunakan jurnalis dalam pemberitaan dapat mempengaruhi persepsi pembaca terhadap suatu peristiwa. Berikut adalah tiga temuan diksi terhadap persepsi pembaca. (a) Konotasi dan denotasi; kata-kata memiliki konotasi (makna tambahan, asosiasi emosional, atau budaya) dan denotasi (makna literal). Misalnya, "seorang gadis disabilitas yang menjadi korban dari tindakan pelaku." Konotasi ini menunjukkan bahwa korban adalah seorang yang lemah dan tidak berdaya. Hal ini akan menghasilkan persepsi yang sangat berbeda di kalangan pembaca. Denotasi adalah makna literal dari kata-kata yang digunakan. Dalam kasus ini, "gadis disabilitas" secara literal mengacu pada seorang perempuan muda dengan disabilitas. Diksi yang emosional dapat membangkitkan perasaan tertentu pada pembaca, seperti kemarahan, ketakutan, atau kesedihan. Hal ini dapat memengaruhi cara pembaca menafsirkan suatu peristiwa. (b) Menciptakan bias; diksi yang bias dapat memengaruhi cara pembaca menafsirkan suatu peristiwa. Jurnalis yang menggunakan diksi yang bias dapat memanipulasi opini pembaca. Bahasa dapat mengandung bias yang tidak disadari oleh penulis, tetapi sangat berpengaruh pada pembaca. Misalnya, penggunaan kata-kata yang stereotipikal atau peyoratif dalam melaporkan tentang kelompok etnis atau gender tertentu dapat memperkuat prasangka dan stereotip negatif. Penggunaan kata-kata yang kuat seperti "kakek cabul" dan "perbuatan bejat" dalam berita tersebut membangkitkan emosi seperti kemarahan dan kebencian terhadap pelaku. Ini dapat mempengaruhi pembaca untuk memiliki perasaan negatif yang kuat terhadap pelaku dan memperkuat rasa empati terhadap korban. Diksi yang digunakan bisa mengandung bias yang mempengaruhi cara pembaca menafsirkan suatu peristiwa. Penggunaan istilah "disabilitas" tanpa penjelasan lebih lanjut mungkin tidak memberi pembaca gambaran yang lengkap tentang situasi korban, yang bisa memperkuat stereotip negatif atau prasangka terhadap individu dengan disabilitas. (c) BK yaitu cara aspek tertentu dari sebuah berita ditekankan atau diminimalisir. Penggunaan diksi dapat membingkai sebuah isu dengan cara tertentu. Misalnya, BK kasus sebagai "persetubuhan" dibandingkan "pemeriksaan" dapat memberikan dampak yang berbeda pada persepsi publik tentang tingkat keparahan kejahatan tersebut. BK yang menekankan tindakan kriminal dan moralitas pelaku menciptakan narasi yang kuat tentang kejahatan dan keadilan.

Keseimbangan Berita

Berita mengenai kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas seringkali dihadirkan dengan berbagai sudut pandang yang bisa mempengaruhi persepsi publik. Tetapi, penting untuk menilai keseimbangan pemberitaan tersebut, artinya keadilan perspektif, termasuk suara penyandang disabilitas sendiri, diwakili secara wajar. Ketidakseimbangan dalam pemberitaan dapat menyebabkan penyampaian informasi yang bias, dengan sudut pandang tertentu yang lebih dominan daripada yang lain. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis cara media daring mengelola keseimbangan dalam liputannya tentang kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Keseimbangan dalam sebuah berita merupakan hal penting yang perlu diperhatikan karena keseimbangan menjadi salah satu kode etik yang harus dipatuhi dalam penulisan dan penyebaran sebuah berita. Independensi juga menjadi poin penting dalam keseimbangan sebuah berita, seperti halnya tidak berpihak kepada penguasa atau salah satu pihak yang diberitakan. Esensi dari pemberitaan yang seimbang adalah memastikan semua pihak yang diberitakan mendapatkan porsi yang adil dalam pemberitaan, seperti halnya pemberitaan tentang isu kekerasan seksual pada penyandang disabilitas, dengan marginalisasi dan diskriminasi pada kelompok penyandang disabilitas. Dengan demikian, keseimbangan dalam pemberitaan dapat membantu dalam menghindari bias dan memastikan bahwa berita dapat dipahami secara menyeluruh oleh publik.

Portal media daring sebagai sebuah media tentunya harus bisa menghadirkan berita yang berimbang. Hal ini bisa dilakukan dengan BK berita dengan baik tanpa menimbulkan bias yang pada akhirnya dapat membuat persepsi publik menjadi tidak baik. Seperti halnya dalam memberitakan isu kekerasan seksual pada penyandang disabilitas, itu harus benar-benar jelas, berimbang, adil, serta sesuai dengan fakta sehingga berita yang disebarluaskan tidak mengancam kelompok penyandang disabilitas.

Keberimbangan juga menjadi salah satu poin yang harus dipatuhi dalam kegiatan jurnalistik. Dengan aktivitas jurnalistik yang melibatkan media massa, prinsip independensi dan netralitas sangat penting. Netralitas harus dijaga karena inti dari media massa adalah kebebasan dalam menerapkan ideologi jurnalistik di lapangan. Sikap netral memastikan pemberitaan yang seimbang, akurat, dan tidak memihak, kecuali pada kepentingan publik. Oleh karena itu, media massa harus selalu menjunjung tinggi netralitas dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi semata.

Berdasarkan dari berita yang berjudul “Kakek di Batanghari Setubuhi Gadis Disabilitas Tetangganya, Kini Hamil 4 Bulan” melalui website resminya, maka dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui keberimbangan media daring tersebut dalam memberitakan isu kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dalam berita tersebut dapat dilihat bahwa media daring ini berimbang dalam menuliskan berita tentang isu kekerasan seksual pada penyandang disabilitas, hal ini dapat dilihat dari fakta pada pelaporan berita yang informasinya didapatkan dari Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Piet Yardi yang berkaitan dengan pengakuan dari pelaku dan korban yakni terletak pada paragraf kelima kutipan kedua “Pelaku mengaku melakukan persetubuhan itu baru sekali, sedangkan korban mengaku sudah dua kali,” katanya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berita tidak memberatkan salah satu pihak karena informasi yang didapatkan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber yang berkompeten dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tersebut. Selain itu, berita yang disebar oleh media daring tersebut tidak merugikan korban sebagai penyandang disabilitas, namun sebaliknya media daring ini ingin menunjukkan bahwa kelompok yang sering mengalami diskriminasi harus dilindungi, seperti halnya dalam berita jelaskan tentang respons dari pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batanghari yang mendapatkan informasi langsung bergerak cepat menangkap pelaku setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban.

Tidak hanya itu saja, dalam berita yang berjudul “Kakek di Batanghari Setubuhi Gadis Disabilitas Tetangganya, Kini Hamil 4 Bulan”, wartawan tidak merugikan pelaku, ditandai dengan identitas pelaku yang dilindungi dengan hanya menyebutkan inisialnya saja, begitu juga dengan korbannya yang hanya disebutkan inisialnya. Hal ini menunjukkan bahwa berita tentang kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di media daring ini tidak hanya berimbang, tetapi juga mematuhi kode etik jurnalistik tentang pelaku dan korban kekerasan seksual, dan hal ini pun sudah dijelaskan melalui UU (Undang-undang) Pers. Pasal 7 (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur bahwa wartawan menaati dan memiliki Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal 5 KEJ mengatur bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tak menyebutkan identitas pelaku.

Keakuratan dan Objektivitas Informasi

Keakuratan dan objektivitas informasi merupakan dua aspek penting. Kebenaran informasi adalah kesesuaian berita dengan fakta yang ada. Objektivitas informasi

adalah kenetralan penyajian berita. Kedua aspek inilah yang menjadi penentu utama dalam menilai kredibilitas media daring. Kebenaran informasi dalam pemberitaan di media daring dapat diukur dari data dan fakta di lapangan. Hal ini mencakup verifikasi sumber berita, kejelasan data yang disajikan, dan penggunaan kutipan yang benar dari sumber. Misalnya, sebuah berita yang berisi data statistik harus menyertakan sumber data yang valid dan relevan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipercaya (Aririguzoh, 2022).

Objektivitas informasi di media daring ini meliputi penyajian berita yang tidak memihak. Media harus berusaha memberikan pandangan yang seimbang dengan memasukkan sudut pandang yang berbeda dalam laporannya. Misalnya, dalam pemberitaan suatu peristiwa politik, media daring sebaiknya memuat pandangan berbagai pihak yang berseberangan agar dapat memberikan gambaran yang utuh kepada pembaca (Sserwanja et al., 2022). Namun, tantangan dalam menjaga keakuratan dan objektivitas informasi masih ada. Terkadang, tekanan untuk menjadi yang tercepat dalam menyampaikan berita dapat mengorbankan keakuratan. Selain itu, adanya kepentingan tertentu dari pemilik media atau pihak tertentu juga dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Oleh karena itu, media daring perlu menerapkan standar jurnalistik yang tinggi dan terus mengevaluasi praktik pemberitaan mereka (Gollmitzer, 2023). Dalam konteks ini, media daring dapat menggunakan teknik cek silang (*cross check*) untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah diverifikasi dari berbagai sumber. Selain itu, pelatihan bagi jurnalis tentang pentingnya etika jurnalistik dan cara menjaga objektivitas pemberitaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas berita.

Sebagai konsumen media, pembaca juga mempunyai peran penting dalam menilai keakuratan dan objektivitas suatu informasi. Pembaca yang kritis akan memeriksa sumber informasi, membandingkan berita dari berbagai media, dan mencari klarifikasi atas informasi yang meragukan. Dengan demikian, literasi media menjadi kunci dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Pentingnya keakuratan dan objektivitas informasi juga didukung oleh berbagai teori komunikasi dan jurnalisme. Misalnya, teori agenda setting menunjukkan kekuatan media (dan media sosial) untuk mempengaruhi topik yang dianggap penting oleh publik dengan menyoroiti isu-isu tertentu (Gill & Baker, 2021). Oleh karena itu, media daring harus berhati-hati dalam memilih dan menonjolkan berita agar tidak memanipulasi persepsi masyarakat baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, teori BK menekankan cara penyajian berita dapat mempengaruhi interpretasi pembaca. BK adalah proses jurnalis untuk memilih aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas dan menjadikannya lebih menonjol dalam konteks komunikasi, sehingga mempengaruhi cara khalayak memahami peristiwa tersebut (Entman, 1993, p. 52).

Media daring harus mewaspadaikan potensi bias BK dan berupaya menyajikan berita secara seimbang dan adil.

Etika jurnalistik juga berperan penting dalam menjaga keakuratan dan objektivitas informasi. Etika ini mencakup prinsip-prinsip seperti kebenaran, keadilan, kemandirian, dan tanggung jawab terhadap publik. Jurnalis media daring harus mematuhi kode etik jurnalistik yang mengatur praktik profesionalnya, antara lain menghindari plagiarisme, menjamin privasi sumber, dan tidak menerima suap atau tekanan dari pihak luar. Di era digital saat ini, saat informasi mudah diakses dan disebarluaskan melalui media sosial dan platform daring, terdapat peluang yang semakin besar untuk menjaga keakuratan dan objektivitas informasi. Portal media daring dan media sosial harus mengadopsi teknologi dan metode verifikasi digital untuk memastikan efektivitas informasi yang disebarkannya telah teruji sebelum dipublikasikan (Sedlmeir et al., 2021). Pemanfaatan teknologi digital dalam pengecekan berita, seperti alat pengecekan fakta otomatis dan analisis data besar (*big data*, kecerdasan buatan) dapat membantu media daring mengidentifikasi dan mengoreksi disinformasi dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, bayangan organisasi pengecekan fakta yang independen dapat mempengaruhi upaya kementerian pertahanan serta kementerian informasi dalam menjaga kualitas informasi. Oleh karena itu, media daring harus terus beradaptasi dan berinovasi dalam praktik jurnalistik untuk memastikan media tetap menjadi sumber informasi yang dapat dipahami dan dihormati oleh masyarakat. Hanya dalam satu menit, media sosial dapat menunaikan tugasnya sebagai media massa yang berguna di era opini publik dan mendukung demokrasi yang sehat.

Etika Jurnalistik

Dalam dunia jurnalistik, etika memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik bersifat akurat, tidak memihak, dan bertanggung jawab. Etika jurnalistik mencakup berbagai prinsip seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Teori etika jurnalistik yang banyak diakui adalah teori deontologis dan teleologis. Deontologis, yang berasal dari kata Yunani "deon" (kewajiban), menekankan pentingnya tugas dan aturan moral dalam praktik jurnalistik. Menurut teori ini, jurnalis memiliki kewajiban untuk melaporkan kebenaran dan bertindak sesuai dengan standar etika profesional tanpa memandang hasil akhir dari tindakan mereka. Sebaliknya, teori teleologis, yang berakar dari kata Yunani "telos" (tujuan), menekankan hasil akhir dari tindakan jurnalistik. Dalam konteks ini, pemberitaan dianggap etis jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi kebenaran atau jumlah orang terbanyak. Kedua teori ini

sering digunakan bersama untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam penilaian etika jurnalistik.

Praktik Etika Jurnalistik

Sebagai salah satu portal berita yang terkemuka di Indonesia, media daring harus berkomitmen untuk mematuhi etika jurnalistik dalam setiap laporan yang diterbitkannya. Beberapa cara media daring mematuhi etika jurnalistik meliputi tujuh poin berikut. (1) Kebenaran dan akurasi; media daring berusaha untuk menyajikan fakta dengan akurat dalam laporan ini. Informasi mengenai kejadian, pelaku, korban, dan proses hukum disampaikan dengan jelas dan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, yaitu pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Batanghari. Penggunaan kutipan langsung dari pihak berwenang menambah kredibilitas berita tersebut. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kebenaran dan akurasi dalam etika jurnalistik. (2) Kebebasan dari kepentingan; berita ini dilaporkan tanpa menunjukkan bias atau keberpihakan. Portal media daring menyajikan informasi secara objektif, mengungkapkan tindakan yang diduga dilakukan oleh pelaku dan dampaknya terhadap korban. Tidak ada indikasi bahwa berita ini dipengaruhi oleh kepentingan politik atau bisnis tertentu, yang menunjukkan komitmen terhadap kebebasan dari konflik kepentingan. (3) Penghormatan terhadap privasi; dalam berita ini, identitas lengkap korban tidak diungkapkan, hanya inisial yang digunakan (DS), sebagai bentuk perlindungan privasi. Ini penting terutama mengingat bahwa korban adalah seorang gadis disabilitas dan mengalami trauma. Penggunaan inisial juga diterapkan pada pelaku (AS), yang menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan hak individu terhadap privasi. (4) Kejujuran dan integritas; portal media daring menunjukkan integritas dalam pelaporannya dengan menyampaikan informasi yang diverifikasi dan berasal dari sumber resmi. Tidak ada indikasi manipulasi informasi atau penyembunyian fakta. Laporan ini juga mencakup pengakuan dari pelaku dan korban, yang menunjukkan upaya untuk menyampaikan berbagai perspektif terkait peristiwa tersebut. (5) Pelaporan yang adil dan seimbang; berita ini mencakup pandangan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Batanghari dan pengakuan dari korban dan pelaku. Penyajian informasi secara seimbang membantu pembaca memahami konteks kejadian tanpa memihak salah satu pihak. (6) Akuntabilitas dan transparansi; dengan mencantumkan pernyataan dari pihak kepolisian dan memberikan rincian tentang tindakan yang diambil terhadap pelaku, media daring menunjukkan akuntabilitas dalam pelaporannya. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan pembaca terhadap media. (7) Tanggung jawab sosial; portal media daring menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan melaporkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang gadis disabilitas. Laporan ini tidak hanya menginformasikan masyarakat tetapi juga

meningkatkan kesadaran tentang perlindungan terhadap kelompok rentan dan pentingnya melaporkan tindakan kriminal. Dengan menyajikan berita ini, media daring membantu mendorong tindakan hukum yang tepat dan mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual.

Implikasi terhadap Persepsi Publik

BK merupakan salah satu cara mengkomunikasikan budaya melalui media (Calderón-Larrañaga et al., 2022; Halik, 2018). Penyajian ini dimaksudkan untuk memasukkan bagian-bagian tertentu atau menyempurnakan aspek-aspek tertentu dan untuk mewujudkan kekhususan suatu zaman atau kenyataan. Media memadukan, menyeleksi, dan menyempurnakan isi sehingga pemaknaan isi lebih mudah dan efektif (Calderón-Larrañaga et al., 2022).

Dampak BK berita daring terhadap masyarakat sangatlah penting. BK dapat mempengaruhi cara orang dibujuk, menafsirkan, dan merespons informasi sistematis yang diberikan oleh media. Dengan memilih aspek cerita yang ingin ditonjolkan, media daring dapat memperluas persepsi masyarakat terhadap permasalahan yang diberitakan. Misalnya, media daring mungkin memilih untuk fokus pada dampak negatif terhadap masyarakat atau fokus pada upaya pemerintah dalam memberitakan krisis ekonomi, sehingga menimbulkan persepsi berbeda di kalangan pembaca (Entman, 1993, p. 52).). Selain itu, BK juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Misalnya, melaporkan masalah kesehatan seperti pandemi COVID-19 dapat memastikan bahwa protokol kesehatan masyarakat dipatuhi. Ketika media daring berbicara tentang bahaya dan risiko penyakit, masyarakat lebih berhati-hati dan mengapresiasi anjuran kesehatan. Di sisi lain, ketika media lebih banyak terpapar pada informasi yang mengurangi risiko, masyarakat mungkin menjadi kurang waspada.

BK juga berperan penting dalam membentuk opini publik. Dalam konteks politik, BK dapat digunakan untuk membangun citra seorang kandidat atau partai. Misalnya, media daring mungkin menyoroti prestasi atau skandal seorang politisi yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politisi tersebut. Dengan demikian, BK dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempengaruhi pemilih dalam kampanye politik. Tantangan BK adalah menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemberitaan. Media harus berusaha untuk tidak terlalu bias terhadap satu sisi atau sudut pandang tertentu, karena dapat menimbulkan bias dan menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi media daring untuk menerapkan prinsip jurnalistik yang mengutamakan akurasi, objektivitas, dan netralitas dalam pemberitaan.

Di era digital saat ini, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial, penerapan BK menjadi semakin kompleks. Media sosial memungkinkan individu menjadi produser konten, artinya BK tidak hanya dilakukan oleh media tradisional, namun juga oleh pengguna individu. Hal ini dapat memperkuat atau mengubah kerangka yang ada dan mempengaruhi persepsi masyarakat secara lebih luas dan cepat. Selain itu, algoritma media sosial yang menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna dapat menciptakan "gelembung filter" dan individu hanya dihadapkan pada informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri. Hal ini dapat memperkuat efek BK dan mempengaruhi persepsi masyarakat secara lebih sempit dan terpolarisasi. Literasi media adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Literasi media membantu masyarakat menjadi lebih kritis ketika mengonsumsi informasi, memahami cara kerja BK, dan mengenali potensi bias dalam berita. Dengan literasi media yang baik, masyarakat dapat mengevaluasi informasi yang mereka terima dengan lebih cerdas dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Secara umum, BK berita media daring berdampak luas terhadap persepsi masyarakat. Media mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyajikan informasi secara adil dan seimbang. Dengan cara ini, hubungan yang sehat antara media dan masyarakat dapat tercipta, yang pada akhirnya mendukung demokrasi yang lebih baik dan masyarakat yang lebih berpengetahuan.

Dampak terhadap Kebijakan Publik

BK dapat memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik dengan cara membentuk persepsi dan opini masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi keputusan pembuat kebijakan. Adanya BK pada berita akan membuat sebuah pemberitaan terbingkai sesuai dengan redaksi atau instansinya. Jika yang dibingkai adalah kebijakan publik, maka secara tidak langsung pemberitaan akan berdampak pada kebijakan publik tersebut. Tergantung pada bingkai yang diberikan, pemberitaan dapat berorientasi pada sisi pro atau kontra. Berikut empat penjelasan rinci mengenai dampak tersebut. (1) Pembentukan opini publik; media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik melalui BK. Cara media membingkai sebuah isu dapat menentukan persepsi publik pada isu tersebut. Misalnya, cara media daring membingkai kasus kekerasan seksual terhadap gadis disabilitas di Batanghari dapat menentukan cara publik mempersepsi isu tersebut. Penggunaan istilah seperti "kakek cabul" dan deskripsi tindakan pelaku sebagai "perbuatan bejat" membentuk opini publik bahwa tindakan tersebut adalah kriminal dan tidak bermoral, yang memicu kemarahan dan simpati terhadap korban. BK mendorong publik untuk mendesak penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran tentang perlunya perlindungan terhadap individu dengan disabilitas. (2) Pendorong partisipasi publik; BK

mendorong partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah. Kasus berita yang menekankan respons cepat polisi dan penangkapan pelaku dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan kasus kekerasan serupa. Ini menunjukkan bahwa hukum ditegakkan dan keadilan dapat dicapai. Masyarakat yang melihat respons tegas terhadap kekerasan seksual mungkin lebih terdorong untuk melaporkan kasus-kasus serupa, yang pada gilirannya dapat membantu pihak berwenang menangani dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. (3) Pembentukan wacana publik; media membingkai isu-isu tertentu dengan cara yang dapat mempengaruhi wacana publik. Dalam kasus di media daring, fokus pada aspek kriminalitas dan moralitas dari tindakan pelaku membentuk wacana publik tentang pentingnya perlindungan terhadap individu dengan disabilitas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Wacana publik yang terbentuk dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, mendorong legislator untuk memperkuat hukum dan kebijakan yang melindungi individu dengan disabilitas dan menangani kekerasan seksual dengan lebih serius. (4) Penguatan legitimasi kebijakan; BK yang mendukung kebijakan tertentu dapat membantu memperkuat legitimasi kebijakan tersebut di mata publik. Dalam kasus di media daring, BK yang menunjukkan tindakan tegas polisi dan penegakan hukum yang cepat tentu memberikan legitimasi pada kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual dan penegakan hukum. Ketika media membingkai respons penegakan hukum sebagai tindakan yang tepat dan cepat, hal ini dapat memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan tersebut dan mendorong penerimaan yang lebih luas terhadap upaya pemerintah dalam menangani kekerasan seksual.

Representasi Isu Disabilitas

Representasi isu disabilitas di media daring sering kali menimbulkan stigma dan stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas. Mereka sering digambarkan sebagai individu yang lemah, bergantung pada orang lain, dan tidak mampu berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pemberitaan bertajuk "Kakek di Batanghari Setubuhi Gadis Disabilitas Tetangganya, Kini Hamil 4 Bulan", digunakan diksi konotasi bahwa korban adalah seorang gadis disabilitas yang menjadi korban dari tindakan pelaku. Konotasi ini menunjukkan bahwa korban adalah seorang yang lemah dan tidak berdaya. Representasi ini cenderung mengikuti model patologi sosial, yang dapat memperkuat sikap diskriminatif dalam masyarakat seperti tergambar pada Tabel 1.

Tabel 1 Representasi dan Contoh

a. Representasi Penyandang Disabilitas

-
1. **Gambaran Umum Penyandang Disabilitas** Penyandang disabilitas sering digambarkan sebagai individu yang lemah, bergantung pada orang lain, dan tidak mampu berkontribusi secara produktif kepada masyarakat

Mereka sering kali diperlihatkan sebagai objek rasa simpati atau rasa iba, bukan sebagai individu yang memiliki potensi dan kemampuan.
 2. **Stigma dan Stereotip** Representasi ini dapat menimbulkan stigma dan stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas.

Stigma dapat berupa persepsi bahwa penyandang disabilitas tidak dapat berkontribusi secara produktif, tidak memiliki nilai, atau tidak layak dianggap sebagai individu yang berharga.

Stereotip dapat berupa persepsi bahwa penyandang disabilitas selalu memerlukan bantuan, tidak mampu berpikir secara independen, atau tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari.
 3. **Model Patologi Sosial** Representasi ini cenderung mengikuti model patologi sosial, yang menggambarkan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki masalah atau kekurangan.

Model ini dapat memperkuat sikap diskriminatif dalam masyarakat, karena menyebarkan persepsi bahwa penyandang disabilitas adalah objek rasa simpati atau rasa iba, bukan sebagai individu yang memiliki potensi dan kemampuan.
 4. **Implikasi Terhadap Pengetahuan dan Persepsi** Representasi ini dapat mempengaruhi pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Masyarakat dapat menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak mampu berkontribusi secara produktif, yang dapat memperkuat stigma dan stereotip negatif.

Representasi ini juga dapat mengurangi kesadaran masyarakat tentang potensi dan kemampuan penyandang disabilitas.

b. Contoh Representasi yang Menyatakan Stigma dan Stereotip

- | | |
|---|---|
| 1. Berita yang Menyoroti Ketergantungan | Berita yang menyoroti ketergantungan penyandang disabilitas pada orang lain, seperti berita tentang individu yang memerlukan bantuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. |
| 2. Gambaran Penyandang Disabilitas sebagai Objek Rasa Simpati | Berita yang menyoroti kasus penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan, seperti berita tentang individu yang mengalami kecelakaan dan memerlukan bantuan. |
| 3. Berita yang Menyoroti Keterbatasan | Berita yang menyoroti keterbatasan penyandang disabilitas, seperti berita tentang individu yang tidak dapat bekerja karena kondisi fisiknya. |
-

Simpulan

Pemberitaan isu terkait disabilitas di media daring berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap komunitas disabilitas. Berdasarkan analisis BK (bingkai, *frame*) yang diterapkan media daring, dapat disimpulkan bahwa media ini cenderung menyoroti berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, antara lain tantangan yang mereka hadapi, pencapaian yang telah mereka capai, dan juga kebijakan pemerintah terkait. kepada penyandang disabilitas. penyandang disabilitas. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendorong keterwakilan yang lebih adil dan inklusif. Pertama, penting bagi media daring untuk memastikan pemberitaan terkait disabilitas tidak hanya berfokus pada narasi kesulitan atau keterbatasan, namun juga menunjukkan potensi dan kontribusi positif penyandang disabilitas kepada masyarakat. Kedua, memasukkan suara dan perspektif penyandang disabilitas dalam berita dapat memberikan gambaran yang lebih otentik dan mengurangi stereotip yang mungkin muncul di kalangan pembaca.

Penting juga bagi media daring untuk terus meningkatkan kualitas jurnalisme dengan berpegang pada prinsip etika dalam meliput isu disabilitas. Hal ini termasuk penggunaan terminologi yang tepat dan sensitif, serta menghindari sensasionalisme yang dapat merugikan komunitas disabilitas. Melalui pendekatan ini, media daring dapat membantu mengedukasi masyarakat, mengurangi stigma, dan mendorong inklusi bagi penyandang disabilitas. Di era digital yang terus berkembang, media daring berpeluang memperluas jangkauan pemberitaan melalui berbagai platform media sosial. Hal ini memungkinkan penyebaran informasi lebih luas dan cepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu disabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, media daring dapat menjangkau khalayak yang lebih beragam dan menyampaikan pesan

yang lebih efektif tentang pentingnya inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi dan komunitas disabilitas dapat memperkaya konten berita dan memastikan bahwa perspektif penyandang disabilitas terwakili dengan baik. Kolaborasi ini juga dapat membuka peluang bagi media daring untuk menyelenggarakan program atau kampanye yang mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, representasi isu disabilitas di media daring berpotensi besar mempengaruhi perubahan positif persepsi dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Media ini dapat bertindak sebagai agen perubahan sosial yang mendukung hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta mendorong lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas jangka waktu penelitian menjadi setidaknya dua tahun dan mengintegrasikan berbagai pendekatan teoritis seperti teori BK dan AWK (analisis wacana kritis, *critical discourse analysis*, CDA). Penting untuk melibatkan penyandang disabilitas melalui wawancara atau diskusi kelompok terfokus (FGD) guna mendapatkan perspektif langsung mereka, serta memperluas analisis pada elemen visual seperti gambar dan video dalam pemberitaan. Melakukan studi komparatif dengan media daring lainnya dan berkonsultasi dengan para ahli serta organisasi disabilitas akan memberikan pandangan yang lebih mendalam dan relevan. Memanfaatkan teknologi terbaru dan alat analisis canggih akan meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengumpulan serta analisis data. Disarankan untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal akademik, konferensi, dan platform relevan lainnya untuk penyebaran yang lebih luas. Selain itu, media daring perlu meningkatkan kesadaran tentang representasi isu disabilitas yang adil dan inklusif dengan menampilkan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki potensi dan kemampuan. Mereka harus mendiversifikasi representasi penyandang disabilitas dengan menampilkan berbagai aspek kehidupan mereka, seperti kontribusi produktif dan upaya mengejar impian mereka. Kerja sama dengan komunitas penyandang disabilitas penting untuk memastikan representasi yang akurat dan adil. Dengan representasi yang lebih adil dan inklusif, masyarakat dapat mengembangkan persepsi yang lebih positif dan inklusif terhadap penyandang disabilitas, yang pada akhirnya memperkuat kesetaraan dan inklusi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Anshori, D.S. (2014). Wacana Keagamaan Syiah-Sunni Dalam Majalah Tempo dan Suara Hidayatullah, Yogyakarta: UNY Jurnal.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/download/1901/1553>

- Aririguzoh, S. (2022). Communication competencies, culture and SDGs: Effective processes to cross-cultural communication. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01109-4>
- Calderón-Larrañaga, S., Greenhalgh, T., Finer, S., & Clinch, M. (2022). What does the literature mean by social prescribing? A critical review using discourse analysis. *Sociology of Health & Illness*, 44(4–5), 848–868. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13468>
- Cramer, F., Shephard, G. E., & Heron, P. J. (2020). The misuse of colour in science communication. *Nature Communications*, 11(1), 5444. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19160-7>
- Entman, R.M. (1993), Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43: 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Erdayani, R., Afandi, S. A., Afandi, M., Aswad, H., & Afandi, N. H. (2023). Political Competition In Riau: A Review Of Critical Discourse Analysis. *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.20901>
- Flemming, K., & Noyes, J. (2021). Qualitative Evidence Synthesis: Where Are We at? *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 1609406921993276. <https://doi.org/10.1177/1609406921993276>
- Gill, J., & Baker, C. (2021). The Power of Mass Media and Feminism in the Evolution of Nursing's Image: A Critical Review of the Literature and Implications for Nursing Practice. *Journal of Medical Humanities*, 42(3), 371–386. <https://doi.org/10.1007/s10912-019-09578-6>
- Gollmitzer, M. (2023). Journalism ethics with Foucault: Casually employed journalists' constructions of professional integrity. *Journalism*, 24(5), 1015–1033. <https://doi.org/10.1177/14648849211036301>
- Guenther, L., Gaertner, M., & Zeitz, J. (2021). Framing as a Concept for Health Communication: A Systematic Review. *Health Communication*, 36(7), 891–899. <https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1723048>
- Halik, Abdul. (2018). Paradigma Kritik Penelitian Komunikasi (Pendekatan Kritis-Emansipatoris dan Metode Etnografi Kritis). *Jurnal Tabligh*, Vol.19, No. 2. <https://core.ac.u/download/pdf/23476012.pdf>
- Jufanny, D., & Girsang, L. R. M. (2020). Toxic Masculinity Dalam Sistem Patriarki (Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film “Posesif”). *Semiotika: Jurnal Komunikasi*, 14(1). <https://doi.org/10.30813/s:jk.v14i1.2194>
- Kestiyoyuni, H. (2022). Identifikasi agenda setting dalam produksi berita detik.com "PSSI luruskan tuduhan Shin Tae-Yong soal tak booking lapangan". *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, 6(2), 81–92. <https://doi.org/10.32832/komunika.v6i2.7973>

- Milya Sari & Asmendari, & Miliya, Sari. (2020). Penelitian Kepustakaan (library research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), (41-53), <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>
- Patriarca, R., Di Gravio, G., Woltjer, R., Costantino, F., Praetorius, G., Ferreira, P., & Hollnagel, E. (2020). Framing the FRAM: A literature review on the functional resonance analysis method. *Safety Science*, 129, 104827. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104827>
- Pertiwi, Putri, Riyadi. N. (2023). *Pelaksanaan Jurnalisme Investigasi dalam Film Dokumenter Kilometer 50 Produksi Tempo.Co*. Skripsi: Repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74648>
- Saleh, R., Fitriana, & Thalib, A. A. (2021). Penelitian Komunikasi Krisis Di Awal Pandemi Covid-19 Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), Article 2. <https://journal.unifa.ac.id/index.php/jku/article/view/350>
- Sandra, A., & Saleh, A. (2015). Analisis Berita Pertanian Koran Kampus IPB Dari Perspektif Agenda Setting Theory (Kasus Mahasiswa SKPM 2009 dan AGH 2008). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 11(2). <https://doi.org/10.46937/1120139074>
- Sedlmeir, J., Smethurst, R., Rieger, A., & Fridgen, G. (2021). Digital Identities and Verifiable Credentials. *Business & Information Systems Engineering*, 63(5), 603–613. <https://doi.org/10.1007/s12599-021-00722-y>
- Sserwanja, Q., Turimumahoro, P., Nuwabaine, L., Kamara, K., & Musaba, M. W. (2022). Association between exposure to family planning messages on different mass media channels and the utilization of modern contraceptives among young women in Sierra Leone: Insights from the 2019 Sierra Leone Demographic Health Survey. *BMC Women's Health*, 22(1), 376. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01974-w>